

## KAJIAN RESTROSPEKTIF PROGRAM PEMBERDAYAAN WANITA NELAYAN DI GUNUNG KIDUL DIY

Oleh:

Muhamad Agus

Fak. Perikanan Universitas Pekalongan, e-mail : [muhagus@plasa.com](mailto:muhagus@plasa.com)

### ABSTRAK

Program pemberdayaan wanita nelayan desa pesisir Pantai Baron Kemadang Gunung Kidul kurang menyentuh kepentingan wanita nelayan, karena minimnya perguliran dana dan pendampingan, padahal organisasi kelompok wanita nelayan memainkan perannya dalam memotivasi anggotanya merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan memajukan pemasaran serta pemupukan permodalan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pemberdayaan wanita nelayan di Desa Kemadang berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukan dari ketersediaan kelompok sasaran yakni wanita nelayan yang memberikan respon positif terhadap sosialisasi program, pelatihan dan perguliran modal serta pendampingan berkelanjutan yang dilaksanakan. Penguatan modal melalui kelompok-kelompok kecil mampu meminimalisir kebiasaan wanita nelayan berhutang pada tengkulak atau rentenir. Di sisi lain, program ini terdapat kekurangan dari sisi pendampingan yang kurang mengacu pada kebutuhan lokal dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : pemberdayaan, wanita, pesisir

### PENDAHULUAN

Salah satu program yang dicanangkan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Program Pemberdayaan Wanita Nelayan, yang merupakan bagian dari PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna, akses wanita nelayan terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi dan meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan. Program yang digulirkan Departemen Perikanan dan Kelautan pada tahun 2004 dengan dana APBN tersebut, menyisakan sejumlah masalah yang membutuhkan keseriusan pemerintah untuk menangannya.

*Pre survey* di lokasi penelitian, Desa Pesisir Pantai Baron Kemadang, Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul antara lain: 1) Kurangnya pendampingan dan minimnya kelompok wanita nelayan di

Kabupaten Gunung Kidul yang menerima perguliran dana, yakni sebanyak 51 orang sebesar Rp.51 juta, sementara separuh lebih lainnya minim permodalan. Wanita nelayan juga belum banyak diikutsertakan untuk merancang kegiatan usaha di daerahnya. 2) Pengalihan tugas dari LEPP sebagai pengelola bantuan nelayan kepada Bank Bukopin setempat menjadikan akses wanita nelayan semakin sulit untuk memperoleh bantuan kredit. 3) Anggapan bahwa bantuan modal seperti halnya *charity program* berdampak pada rasa ketergantungan penerima bantuan yang tinggi terhadap bantuan. Organisasi kelompok wanita nelayan memainkan perannya dalam memotivasi anggotanya merencanakan kegiatan pengembangan usaha dan memajukan pemasaran dan pemupukan permodalan. Studi tentang dinamika kelompok menjadi menarik untuk melihat respon mereka terhadap program-program pemerintah. Dengan melihat faktor-faktor yang



mempengaruhinya, pada akhir riset ini akan dirumuskan perlakuan yang tepat agar program berjalan optimal, khususnya Program Pemberdayaan Wanita Nelayan yang partisipatif integratif PEMP. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil riset ini akan bermanfaat untuk pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkesinambungan, yang titik tekannya pada :

1. Memberikan masukan kepada instansi terkait tentang pola kemitraan yang tepat bagi pemberdayaan kelompok wanita nelayan sehingga diharapkan peran kelompok wanita nelayan dapat optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Memberikan masukan kepada instansi terkait tentang peranan kelompok wanita nelayan dalam meningkatkan partisipasi wanita nelayan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

### METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitik dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi gambaran suatu gejala dan kenyataan sosial dengan jalan mendiskripsikan variabel sesuai dengan masalah inti, dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai dinamika kelompok wanita nelayan, deviasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pemberdayaan kelompok wanita nelayan di Desa Kemadang-Gunung Kidul.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Wanita Nelayan merupakan bagian dari PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wanita nelayan dalam manajemen usaha dan teknologi tepat guna, akses wanita nelayan terhadap sumber daya, modal, pasar dan teknologi dan meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha perikanan. Di samping itu program ini bertujuan memperlancar kelangsungan usaha masyarakat pesisir dan meningkatkan pendapatan khususnya kelompok wanita nelayan. Program yang digulirkan Departemen Perikanan dan Kelautan dibiayai dengan dana APBN. Sebelum dilaksanakan program Pemberdayaan Kelompok Wanita Nelayan yang merupakan proyek Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2004, di lokasi penelitian desa pesisir Kemadang, Baron, Kecamatan Tanjungsari Gunung Kidul, telah terbentuk Kelompok Wanita Nelayan Sido Rukun dan kelompok Bakdi Manunggal. Namun berdasarkan identifikasi dari tim Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DIY, diputuskan dibentuk kelompok wanita nelayan baru dan kedua kelompok sebelumnya menjadi embrionya. Kelompok wanita nelayan tersebut beranggotakan 51 orang wanita yang merupakan sekumpulan penjual ikan yang memiliki komitmen yang kuat dan visi yang sama untuk memajukan para penjual ikan. Kelompok ini



terbagi menjadi kelompok kecil Mina Artha Mandiri, Mina Boga dan Mina Makmur, yang masing-masing memiliki kepengurusan seperti ketua, sekretaris dan bendahara.

Sebelum dilakukan perguliran dana, kelompok wanita nelayan tersebut mendapatkan bimbingan teknis manajerial dan administrasi kelompok, meliputi manajemen keuangan; tata administrasi dan tata usaha; penyimpanan bukti transaksi, dan penyusunan AD/ART sub kelompok masing-masing. Langkah selanjutnya ialah pembukaan rekening di BRI Unit Baleharjo pada tanggal 19 Oktober 2004, dan diikuti dengan penyaluran dana dari KPKN Yogyakarta pada bulan Desember 2004. Penyaluran kepada anggota kelompok wanita disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut: karakter dan sifat debitur; kondisi ekonomi debitur; modal yang pernah didapat dan diputarkan kembali kepada debitur; kemampuan membayar kembali pinjaman serta jaminan yang akan diagunkan oleh pemberi kredit.

Keuangan kelompok wanita nelayan selanjutnya diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran anggota, bunga pinjaman, tabungan serta usaha yang lain. Penetapan dan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga hingga penetapan besarnya pinjaman dan jumlah penerimanya ditentukan oleh musyawarah anggota. Dalam setiap bulannya (per tanggal 30), dilakukan rapat pengurus dan pertemuan anggota. Dalam pertemuan itulah, pembayaran tabungan, setoran per bulan dan bunga dibayarkan. Bunga pinjaman ditetapkan 1,5% perbulan.

Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi, program Pemberdayaan kelompok wanita nelayan telah berjalan cukup baik,

mendapat respon positif dari kelompok sasaran, yakni kelompok wanita nelayan. Artinya, isi dan tujuan program setidaknya cukup dipahami dengan baik yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran mereka yang tinggi pada saat sosialisasi, tiap pertemuan anggota dan pelatihan. Di samping itu, ada kesadaran yang tinggi bagi mereka untuk mengangsur pinjaman modal setiap bulan kepada kelompoknya. Kemampuan wanita nelayan dalam mengakses informasi program juga turut menentukan berhasil tidaknya implementasi program tersebut. Selama 19 bulan berjalan, mereka mendapatkan informasi langsung perihal pembinaan dari pihak Diskanla DIY maupun pendamping pelaksana melalui perwakilan kelompok per bulannya.

Ditilik dari sisi sumberdaya, minimnya sumber dana yang digulirkan mengakibatkan hanya 42,5% saja dari total jumlah wanita nelayan yang terjangkau program ini. Dana pinjaman 1 juta rupiah yang diberikan kepada wanita nelayan tidak cukup membantu banyak untuk pengembangan usaha. Pada bagian lain, dengan perguliran dana yang tidak merata menyulitkan bagi yang tidak menerima untuk memiliki akses permodalan dan pelatihan yang sama dengan kelompok yang telah menerima bantuan. Hanya bermodal rasa gotong royong yang tinggi, kelompok 51 orang tersebut pada gilirannya merelakan sebagian perguliran modal dipinjamkan oleh mereka di luar kelompok atas rekomendasi anggota kelompok dan atas nama anggota pemberi rekomendasi tersebut. Sistem penguatan modal yang dirintis ini menyiratkan penguatan lembaga dalam pengembangan ekonomi pesisir. Dengan demikian, dari aspek



pemanfaatannya program ini telah mampu menggiring wanita nelayan untuk lebih berpartisipasi merencanakan dan mengembangkan usahanya melalui komunitas kelompok. Selain itu, program ini cukup dapat meningkatkan pendapatan wanita nelayan dan menambah jumlah wanita nelayan yang terjun dalam pengembangan pengolahan ikan. Bila sebelum program diimplementasikan, pendapatan wanita nelayan per minggu mencapai 30.000 sementara sesudah program ini berlangsung, pendapatan mereka meningkat berkisar 50.000 hingga 200.000 per minggu.

Selain tujuan tersebut tercapai, penguatan permodalan melalui kelompok wanita nelayan dapat meminimalkan kegiatan mereka berhutang pada tengkulak maupun rentenir pada masa-masa paceklik atau ketika tahun ajaran baru. Hingga putaran dana yang ketiga akhir bulan September, kelompok wanita nelayan Pantai Baron ini telah mengumpulkan uang jasa pinjaman/keuntungan lebih dari 15.000.000.

Sederet catatan peneliti dari sisi kesiapan aparat birokrasinya, nuansa tarik ulur 'rebutan proyek' antara Diskanla Propinsi dan Bapeda sub bidang Pertanian Kabupaten Gunung Kidul cukup jelas. Keterlibatan pemerintah daerah dan LEPP setempat, selama ini sebatas koordinasi saja dan bukan pelimpahan tanggung jawab pembinaan. Dalam pelaksanaan proyek Program Pemberdayaan Wanita Nelayan DIY ini, pihak LEPP, Artha Samudra tidak dilibatkan dan ini sempat disesalkan oleh para pengurusnya (wawancara Agustus 2006). Sejak awal proyek yang ditangani Diskanla DIY ini mendapat mitra pendamping pelaksana *Bee Pro Consulting* yang bertanggung jawab menangani

program pelatihan hingga perguliran dana. Fungsi mitra pendamping di sini adalah memberi arahan, pandangan, program kerja dan hal teknis yang telah disusun oleh Bagian Proyek Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DIY TA 2004 kepada wanita nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam implementasinya, perguliran dana terlambat dua bulan dari jadwal yang seharusnya. Penundaan ini disertai sejumlah alasan Diskanla bahwa bila dana tersebut dikucurkan menjelang Lebaran 2004, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dana ke arah pembelanjaan konsumtif dari wanita nelayan. Sementara dari sisi wanita nelayan, sebenarnya perguliran dana itu amat diharapkan karena pada saat Lebaran dan liburannya, pantai Baron dipadati pengunjung. Saat itulah, kesempatan emas mereka untuk mendulang rupiah dari pengolahan ikan, toko cinderamata dan rumah makan. Selain problem bertaut masalah dana, input yang diberikan mitra pendamping tidak terlalu efektif mengingat penanggung jawab *Bee Pro Consulting*, salah satunya adalah Kepala Diskanla Propinsi DIY. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dari program ini cukup lemah.

Selanjutnya, setelah perguliran dana dilakukan, penanganan pendampingannya dilanjutkan oleh CV Global Mandiri, mitra yang ditunjuk Diskanla Propinsi DIY. Pemindahan kewenangan pembinaan tersebut setidaknya mengoyak ikatan yang terjalin dengan baik antara kelompok sasaran dan mitra pendamping sebelumnya. Di sisi lain, kontinuitas program terganggu karena mitra terakhir ini harus mempelajari ulang karakter dan perlakuan terhadap kelompok sasaran. Penanganan pembinaan sebagai



kelanjutan program Pemberdayaan Wanita Nelayan yang dilakukan oleh CV Global Mandiri pun tidak fokus karena pihak ketiga tersebut harus menangani pembinaan kelompok wanita lain di wilayah pesisir di DIY. Diakui para pendampingnya, mereka hanya melanjutkan pembinaan sehingga kontinuitas program, penerapan hasil-hasil pelatihan sebelumnya belum sempat tertangani dengan baik. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kebiasaan lama wanita nelayan dalam pengepakan ikan, pembukuan yang tidak rapi dan kurangnya sanitasi pengolahan makanan masih dijumpai. Pelatihan yang telah diberikan terkadang kurang mengacu pada ketersediaan fasilitas, potensi perikanan dan kelautan setempat dan kemampuan wanita nelayan itu sendiri.

Mengacu pada problema di lapangan, tidak cukup kiranya pendampingan yang selama ini berjalan hanya satu bulan sekali. Bantuan teknis dan bimbingan langsung pada tiap individu wanita nelayan perlu dilakukan karena hasil pengamatan peneliti, ketrampilan pengelolaan keuangan dan memasak hanya didominasi sekelompok wanita nelayan tertentu terutama yang mengikuti pelatihan. Dengan kata lain, pembinaan yang lebih intensif dan fokus mengacu pada kebutuhan wanita nelayan dan potensi setempat harus lebih ditingkatkan. Penekanan pada aspek kebutuhan ini mutlak, mengingat seringkali pihak pemerintah sekedar menjadi kepanjangan tangan dari proyek besar di tingkat nasional yang belum tentu cocok bagi daerah tersebut, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pemilihan materi pelatihan. Model pelatihan dengan studi banding ke Semarang di awal program pemberdayaan wanita

nelayan contohnya, justru mengesankan bahwa pihak penyelenggara sekedar menghamburkan uang jatah proyek. Demikian halnya dalam distribusi bantuan peralatan, Diskanla Propinsi DIY juga tak mampu menolak karena merupakan penjatahan DKP. Akibatnya, sejumlah peralatan tidak mampu difungsikan sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan Wanita Nelayan cukup baik dengan sederet kekurangan terutama dari sisi pendampingan dan perlu dirumuskan pola pendampingan yang lebih baik.

Kebutuhan mereka berkelompok juga ditunjang dengan ketersediaan modal usaha yang dikelola kelompok dipadu semangat gotong royong yang tinggi merupakan modal sosial yang berperan dalam pembentukan dan penguatan modal yang sesungguhnya. Dengan demikian mereka merasa kelompok itu milik bersama yang harus dibina dan dikembangkan secara bersama pula dan mewujudkan fasilitas agar kelompok dapat hidup dan berkembang dengan baik. Di samping catatan positif tentang potensi wanita nelayan sebagaimana terurai di atas, masalah (1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok dan sanksi bagi yang melanggar peraturan kelompok (2) kurangnya informasi-informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok untuk mencari dan menambah anggota baru merupakan faktor yang melemahkan dinamika kelompok wanita nelayan.



## SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program pemberdayaan Wanita Nelayan di desa Kemadang berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan kelompok sasaran yakni wanita nelayan yang memberikan respon positif terhadap sosialisasi program, pelatihan dan perguliran modal serta pendampingan berkelanjutan yang dilaksanakan. Bahkan melalui program ini, telah berlangsung penguatan modal sekaligus penguatan kelompok wanita nelayan yang semula kurang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha perekonomian lokal masyarakat pesisir. Penguatan modal melalui kelompok-kelompok kecil setidaknya mampu meminimalisir kebiasaan wanita nelayan berhutang pada tengkulak atau rentenir. Di sisi lain, program ini terdapat kekurangan dari sisi pendampingan yang kurang mengacu pada kebutuhan lokal dan konsep pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan wanita nelayan tidak luput dari peran kelompok wanita nelayan dalam mengelola keuangan dan memotivasi anggotanya untuk aktif dalam program ini. Dinamika wanita nelayan yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh sederet faktor yakni pemahaman anggota yang cukup baik terhadap 1) tujuan kelompok, 2) struktur kelompok, 3) fungsi tugas, 4) pembinaan kelompok, 5) kekompakan kelompok, 6) suasana kelompok, 7) tekanan pada kelompok berupa peringatan dan sanksi sosial dan 8) keefektifan kelompok. Di samping catatan positif tentang potensi wanita nelayan sebagaimana terurai di atas, masalah (1) belum adanya aturan tertulis yang mengatur aktivitas kelompok dan sanksi bagi yang

melanggar peraturan kelompok (2) kurangnya informasi-informasi baru yang disampaikan pengurus kepada anggota (3) kurangnya kegiatan kelompok untuk mencari dan menambah anggota baru merupakan faktor yang melemahkan dinamika kelompok wanita nelayan.

Melihat potensi wanita nelayan di lokasi penelitian, kemungkinan untuk membentuk koperasi wanita nelayan cukup besar sehingga suntikan modal selanjutnya hendaknya diarahkan ke pembentukan koperasi sehingga ruang gerak usaha dan perekrutan anggota pun tidak terbatas.

Pendampingan intensif meliputi bantuan teknis dan administrasi terhadap pengelolaan keuangan mutlak dilakukan. Selain melatih kerapihan administrasi, pengarsipan dan rasa tanggung jawab yang tinggi juga menumbuhkan kemampuan *forecasting* dalam pengembangan usaha meski dalam skala mikro. Pendampingan hendaknya sampai pada upaya membantu kelompok wanita nelayan tersebut memperoleh akses permodalan lain dari perbankan karena selain belum *bankable*, wanita nelayan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pengajuan kredit bila dibanding nelayan pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.E., 1990, *Managing in Developing Countries: Strategic Analysis and Operating Techniques*, New York, Free Press.
- Argawal, Bina, 1991, *Social Security and The Family: Coping with Seasonality and Calamity in Rural India* dalam Ehtisham Ahmad et al (ed.), *Social Security in*



- Developing Countries*, Oxford, Clarendon Press.
- Amirudin (ed.), 2004, *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, PLOD UGM dan DEPDAGRI, Yogyakarta, Jogja Global Media.
- Ali Supardan, 2004 *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Makalah, Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.
- Bustanul Arifin, 2004, *Peta Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, Jakarta, Pustaka Nasional.
- Carwright, Dorwin dan Alvin Zender, 1968, *Group Dynamics, Research and Theory*, Harper & Row Publisher, New York.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, Petunjuk Teknis Pemberdayaan Wanita Nelayan. Bagian Proyek Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dep. Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Hare, A.P, 1962, *Handbook of Small Group Research*, The Free Press-New York.
- Hafidhuddin, Didin, 1987, *Kelompok Pengajian Sebagai Potensi Media Penyuluhan Pembangunan Masyarakat Desa*, Thesis, Fakultas Pascasarjana IPB, Bogor.
- Jenkins, D.H, 1991, *What is Group Dynamics?* in Group Development Selected Reading Series One. National Training Laboratories, edited by L.P. Dardford, National Education Association, Washington.
- Ju Lan, Thung, 1989, Jaringan Sosial Elit Ekonomi Etnis Cina di Indonesia: Studi Kasus Pengusaha Konstruksi di Jakarta, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, no. 2.
- Rokhmin Dahuri, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Ratna Saptari, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta.
- Sutopo, HB, 1988, *Penelitian Kualitatif, Dasar, Teoritis, Praktis*, UNS Press, Surakarta.
- Sjahrir, Kartini, 1986, Tukang-Tukang Bangunan di Jakarta: Suatu Jaringan Kerja, *Jurnal Prisma*, no.9, September.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1999, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- TCPA, 1985, *Planning for Suitable Environment*, London, Earthscan Publication Ltd.
- Weick, K.E ,1997, *Enactment Process in Organization*, Chichago, Clair Press.
- Yuwono, Pujo Semedi Hargo, 2002, Otonomi Daerah di Sektor Penangkapan Ikan, *Jurnal Populasi*, Volume 13, Yogyakarta, PSKK, UGM.